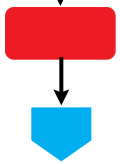
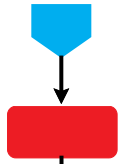
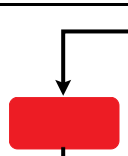
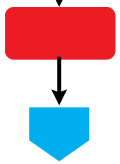
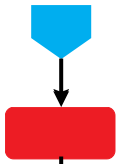
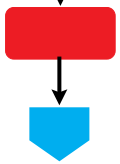
KEMENTERIAN HUKUM **Sekretariat Jenderal**	**NOMOR SOP**	SEK-OT.02.02-155
	TANGGAL PEMBUATAN	30 SEPTEMBER 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	16 OKTOBER 2025
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**   **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	**PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PUSAT KEMENTERIAN HUKUM**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 2. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029; 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029; 5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 7. Peraturan Menteri Hukum terkait tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum terbaru	Mehamami proses penataan kelembagaan pada organisasi Kementerian Hukum sesuai peraturan perundang-undangan
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. SOP Persuratan; 2. SOP Penyelenggaraan Rapat 3. SOP Penyusunan Peraturan Menteri tentang ORTA Kementerian Hukum	1. Dokumen RPJMN dan Resntra Kementerian Hukum; 2. Komputer / Laptop / Printer; 3. Jaringan koneksi internet; 4. Alat tulis.
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, proses penataan kelembagaan pada organisasi Kementerian Hukum akan terhambat	Disimpan sebagai dokumen

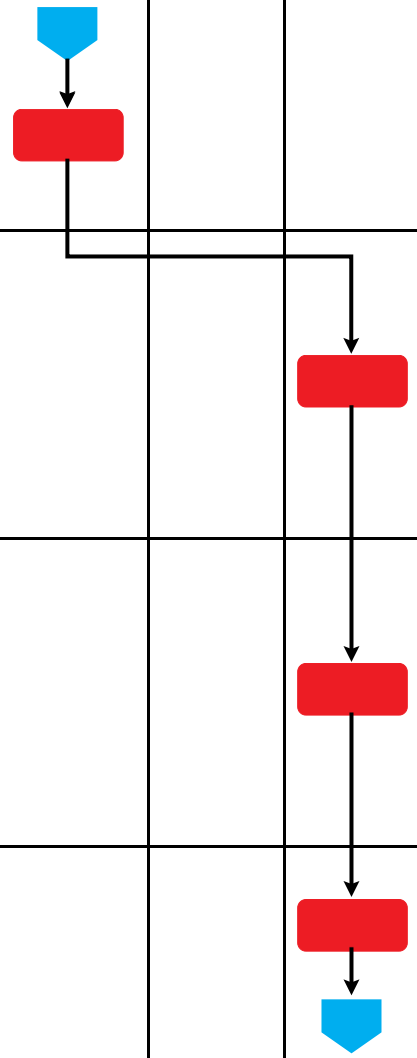
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PUSAT KEMENTERIAN HUKUM

No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Meminta daftar invetarisasi masalah terkait rencana penataan kelembagaan Unit Eselon I Kementerian Hukum									Hasil review summary rencana penataan kelembagaan Unit Eselon I Kementerian Hukum	1 Minggu	Surat permintaan usulan penataan kelembagaan Unit Eselon I	-
2	Menyusun daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Unit Eselon I									Surat permintaan usulan penataan kelembagaan Unit Eselon I	3 Minggu	Daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Unit Eselon I	-
3	Menyampaikan usulan penataan kelembagaan melalui daftar inventarisasi masalah pada tugas fungsi dan struktur organisasi Unit Eselon I									Daftar inventarisasi masalah terkait kelembagaan pada tugas fungsi dan struktur organisasi Unit Eselon I	1 Minggu	Naskah urgensi penataan kelembagaan Unit Eselon I	-
4	Mendisposisi daftar inventarisasi masalah Unit Eselon I untuk ditelaah dan dianalisis kepada bawahan									Naskah urgensi penataan kelembagaan Unit Eselon I	2 Hari	Usulan penataan organisasi Unit Eselon I berdasarkan analisa kebutuhan organisasi	-
5	Melakukan telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I									Usulan penataan organisasi Unit Eselon I berdasarkan analisa kebutuhan organisasi	1 Bulan	Dokumen hasil telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I	-

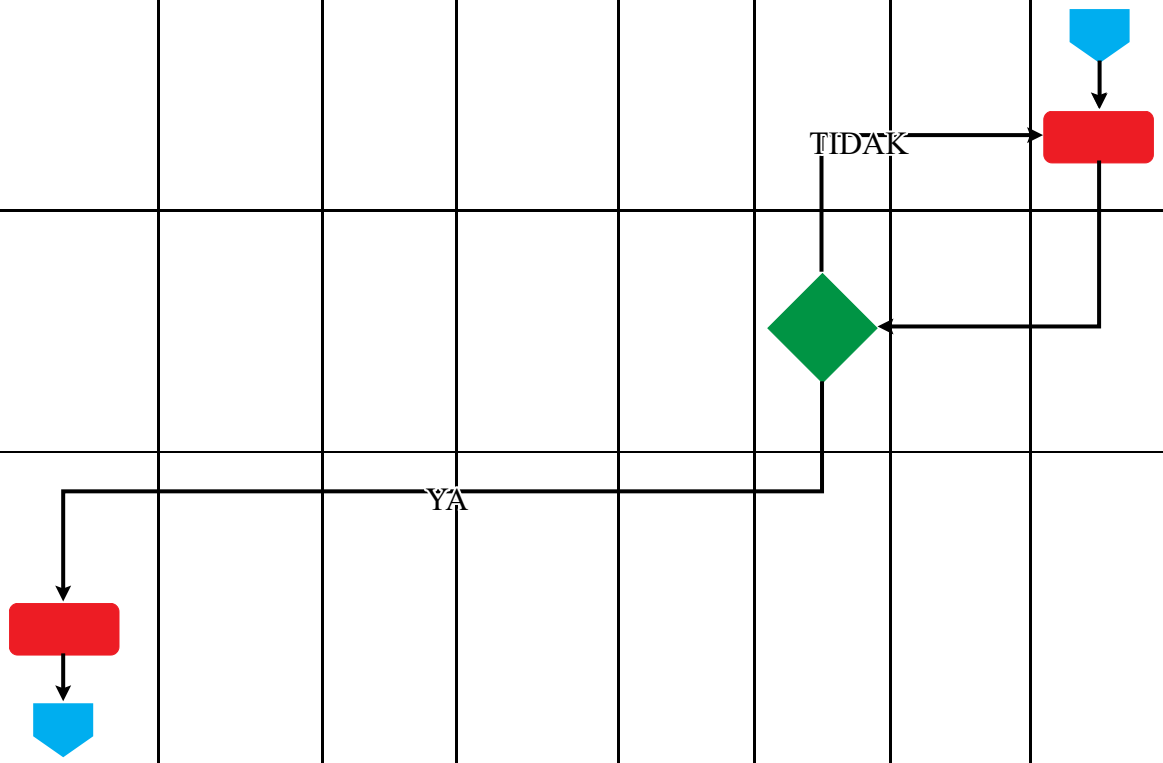
No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Menyusun rancangan kerangka kelembagaan Unit Eselon I kedalam dokumen Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum beserta naskah urgensinya									Dokumen hasil telaah dan analisis terhadap daftar inventarisasi masalah penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I	2 Minggu	Rancangan kerangka kelembagaan setiap Unit Eselon I	-
7	Melakukan rapat pembahasan dengan Unit Eselon I terhadap hasil kajian yang dilakukan Biro Perencanaan dan Organisasi terhadap usulan penataan kelembagaan berdasaran daftar inventarisasi masalah setiap Unit Eselon I									Rancangan kerangka kelembagaan setiap Unit Eselon I	2 Minggu	Dokumen rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan setiap Unit Eselon I	-
8	Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan terkait penataan kelembagaan Unit Eselon I dengan memperbaiki dan menyempurnakan tugas fungsi berdasarkan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I									Dokumen rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan setiap Unit Eselon I	1 Minggu	Dokumen rancangan penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I yang telah disesuaikan dengan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I	-
9	Pembahasan kembali beberapa rapat lanjutan dengan Unit Eselon I untuk finalisasi rancangan kerangka kelembagaan dalam bentuk dokumen Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian dan naskah urgensinya									Dokumen rancangan penataan kelembagaan setiap Unit Eselon I yang telah disesuaikan dengan turunan Renstra dan Proses Bisnis Kementerian dan Unit Eselon I	1 Bulan	Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	-

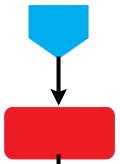
No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Mengundang KemenPANRB dalam rapat pembahasan review rancangan kerangka kelembagaan yang telah disepakati setiap Unit Eselon I									Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	1 Minggu	Review terhadap rumusan Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	-
11	KemenPANRB memberikan arahan dan koreksi pada rapat review terhadap rancangan kerangka kelembagaan Unit Eselon I Kementerian Hukum									Review terhadap rumusan Draft final rancangan penataan kelembagaan yang telah disepakati untuk diajukan ke KemenPANRB	1 Minggu	Draft rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan KemenPANRB yang telah dikoreksi dan disempurnakan	-
12	Rapat Pembahasan dengan Unit Eselon I sebagai tindaklanjut hasil review dan masukan dari KemenPANRB									Draft rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil bahas dengan KemenPANRB yang telah dikoreksi dan disempurnakan	1 Minggu	Draft final rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil masukan dan koreksi dari KemenPANRB	-
13	Rapat finalisasi yang melibatkan Pimti Madya Unit Eselon I untuk menetapkan kerangka kelembagaan yang akan diajukan ke KemenPANRB									Draft final rancangan penataan kelembagaan sesuai hasil masukan dan koreksi dari KemenPANRB	1 Minggu	Draft final rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum yang diusulkan ke KemenPANRB	-

No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
14	Mengajukan konsep Surat Menteri Hukum tentang penataan kelembagaan Kementerian Hukum									Draft final rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum yang diusulkan ke KemenPANRB	1 Minggu	- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kementerian Hukum	-
15	KemenPANRB mempelajari usulan penataan kelembagaan Kementerian Hukum									- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kementerian Hukum	3 Bulan	Hasil telaah dan kajian internal Tim Kelembagaan KemenPANRB	-
16	KemenPANRB mengundang kedalam sejumlah rapat sebagai tindaklanjut usulan penataan kelembagaan Kementerian Hukum hingga diperoleh kesepakatan bersama									- Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum - Naskah urgensi penataan kelembagaan Kementerian Hukum	2 Minggu	Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kementerian Hukum dari KemenPANRB	-
17	KemenPANRB melakukan rangkaian tahapan proses pembentukan regulasi, termasuk mengusulkan proses harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum kepada Ditjen PP									Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kementerian Hukum dari KemenPANRB	2 Minggu	Surat Undangan Rapat Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kementerian Hukum dari KemenPANRB	-



No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
18	Mengundang pihak pemrakarsa dan stakeholder dalam rapat pembahasan harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum hingga selesai dan disepakati bersama									Surat Undangan Rapat Harmonisasi Pembahasan Usulan Penataan Organisasi Kementerian Hukum dari KemenPANRB	1 Minggu	Surat Tanda Selesai Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	-
19	KemenPANRB menetapkan kerangka penataan kelembagaan Kementerian Hukum									Surat Tanda Selesai Harmonisasi rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	1 Bulan	Surat Menteri PANRB terkait Persetujuan Penataan Kelembagaan Kementerian Hukum	-
20	Menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum kepada Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama untuk ditetapkan									- Surat Menteri PANRB terkait Persetujuan Penataan Kelembagaan Kementerian Hukum - Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	1 Minggu	Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi kepada Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja hal permohonan penetapan pengundangan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	-



No	Kegiatan	KARO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	SEKRETARIS UNIT ESELON I	KABAG ORTALA DAN TU	SEKRETARIS JENDERAL	MENTERI HUKUM	MENTERI PANRB	KARO HUKERMA	DITJEN PP	Mutu Baku			Keterangan
										Kelengkapan	Waktu	Output	
21	Berkoodinasi dengan Ditjen PP terkait tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum									Dokumen dan Surat pendukung yang dibutuhkan untuk pengajuan pengundangan peraturan	3 Hari	Dokumen proses tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	-
22	Menetapkan pengundangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum									Dokumen proses tahapan pengajuan pengundangan rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	1 Minggu	Peraturan Menteri Hukum tentang ORTA Kementerian Hukum	-